



Pemda Kucurkan Rp3,2 M Tebus 1.546 Ijazah

JOGJA—Pemda DIY mengeluarkan Rp3,24 miliar untuk membebaskan 1.546 ijazah siswa yang tertahan di SMA/SMK swasta di wilayah DIY.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Sebanyak 1.546 ijazah siswa yang tertahan itu ada di 179 sekolah di DIY karena terkendala tunggakan pembayaran di sekolah dan tidak mampu membayar hingga lulus. Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, menjelaskan pembebasan ijazah yang ditahan itu menggunakan APBD DIY melalui program beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan.

Pada 2022 ini telah dibebaskan sebanyak 1.546 ijazah dari 179 sekolah di DIY dengan anggaran total Rp3,24 miliar yang dibagi dalam dua tahap pembebasan. Pada tahap pertama menyasar sebanyak 402 ijazah dari 94 sekolah dengan total biaya Rp897 juta.

► **Pembebasan ijazah yang ditahan itu menggunakan APBD DIY melalui program beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan.**

► **ORI DIY menyambut baik kebijakan Pemda DIY yang menebus ribuan ijazah dengan mengeluarkan uang miliaran rupiah.**

► Halaman 11

Pemda Kucurkan...

Tertdiri atas Sleman 152 ijazah, Gunungkidul 90 ijazah, Bantul 61 ijazah, Kulonprogo 53 ijazah dan Kota Jogja sebanyak 46 ijazah. "Kemudian pada tahap kedua dibebaskan sebanyak 1.144 ijazah dari 85 sekolah dengan total biaya Rp2,34 miliar. Tertdiri atas Bantul 362 ijazah, Gunungkidul 267 ijazah, Sleman 245 ijazah, Kulonprogo 237 ijazah dan Kota Jogja sebanyak 33 ijazah," katanya, Selasa (22/11).

Ribuan ijazah itu ada yang tertahan selama bertahun-tahun, akan tetapi sebagian besar tertahan sejak 2019 silam hingga 2021. Didik mengungkapkan ijazah tersebut tertahan di sekolah swasta karena siswa masih memiliki tunggakan operasional pendidikan yang harus dibayarkan.

Jumlah paling banyak yang tertahan berasal di SMK, di mana orang tua berada di ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak memiliki uang untuk membayarkan tunggakan. Sehingga para siswa tersebut memilih membiarkan ijazahnya tetap berada di sekolah sampai dia lulus. "Yang dibebaskan rata-rata lulusan tahun 2019 sampai 2021, setiap ijazah yang kami bayarkan tunggaknya maksimal Rp4 juta. Tetapi rata-rata di bahwa angka itu tunggaknya, mereka dari keluarga kurang mampu, harapan kami ke depan tidak ada lagi," katanya.

Didik menambahkan proses pembebasan itu dilakukan melalui koordinasi dengan pihak SMA/SMK di DIY untuk melakukan inventarisasi ijazah yang tertahan. Menurut Didik saat itu terdeteksi ada sekitar 2.000 ijazah yang

terpaksa ditahan pihak sekolah karena orang tua tidak mampu membayarkan biaya tunggakan.

Syarat berikutnya dengan melakukan identifikasi terhadap latar belakang orang tua, hasilnya memang sebagian besar dari kalangan keluarga kurang mampu sehingga Disdikpora DIY menggunakan beasiswa untuk menebus ijazah tersebut. "Kayaknya sudah hampir habis karena sebelumnya kami mengidentifikasi sekitar 2.000-an ijazah sekarang sudah dibebaskan sejumlah itu [1.546] ijazah, masih tersisa sekitar beberapa ratus. Tetapi ada beberapa ijazah lama kami juga berusaha bebaskan tetapi setelah dicari orangnya sudah tidak ada," katanya.

Ia mengatakan Disdikpora DIY berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan menengah, melalui beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Harapannya ijazah yang sudah diserahkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meraih cita-cita dan kesejahteraan untuk masa depan yang lebih baik. "Tentunya mereka bisa memanfaatkan ijazah tersebut misal suatu saat akan melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja," ujarnya.

Tingkat SMP

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menyambut baik kebijakan Pemda DIY yang menebus ribuan ijazah dengan mengeluarkan uang miliaran rupiah. Meski demikian kebijakan itu belum

sepenuhnya menuntaskan masalah sehingga harus ada penyelesaian jangka panjang.

Ketua ORI DIY, Budhi Masthuri menilai kebijakan Pemda DIY menebus ijazah siswa dengan anggaran mencapai Rp3,2 miliar adalah langkah yang baik. Karena sangat membantu terutama sekolah swasta yang mengalami minus akibat banyak tunggakan siswa yang belum mampu dibayar.

Selama ini, aduan di sektor layanan pendidikan pada kasus penahanan ijazah termasuk yang paling sering dilaporkan ke ORI DIY. Ia menilai kebijakan untuk menebus ini sebaiknya juga diterapkan oleh kabupaten dan kota yang membawahi jenjang SMP. Mengingat masih ditemukan juga kasus penahanan ijazah di jenjang SMP. "Maka, kebijakan menebus ijazah siswa juga relevan untuk dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di DIY. Sehingga bisa menganggarkan untuk menebus ijazah jenjang SMP," katanya, Selasa.

Karena akar masalah dari persoalan penahanan ijazah adalah praktik pungutan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar maupun menengah. Oleh karena itu, masalah pungutan inilah yang seharusnya juga diselesaikan. "Gubernur dan DPRD DIY harusnya membuat kebijakan Perda atau Pergub untuk mewujudkan DIY nir pungutan sekolah. Karena tunggakan biaya pendidikan yang berdampak penahanan ijazah rata-rata penyebabnya adalah karena siswa tidak mampu melunasi pungutan," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005